

Representasi Kelompok Anarko di Media: Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko dan Paham Anarkisme

Mohammed Aden Suryana¹

¹Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the representation of anarcho in the mainstream media for their presence in various social actions, starting from the commemoration of Labor Day (MayDay) to the action against the Job Creation Bill through various symbols with media discourse in describing and reporting on anarcho circles. The method of critical discourse analysis is used in this study as an effort to understand the power relations between media discourse in describing anarcho people and the symbolization carried out by anarcho people to mark their presence in social action. The results of this study found discourse from the mainstream media in describing and reporting on anarcho circles in the form of framing through various processes in such a way, resulting in a news content that embeds the judgment that anarcho circles are the party most responsible for creating riots, destruction, vandalism, and disrupting public order and convenience during social action. Several other studies on the discussion of anarcho and media from cross-disciplinary researchers are included as an effort to strengthen the findings in this study, as well as being able to provide perspectives through another dimension, namely studies related to media and culture. Because anarcho circles have a long review of the background and historical context as a cultural form of social interaction in society, and on the other hand, the media is an important subject whose role is to describe and report on all forms of social phenomena and problems in society. The conclusion of this research is that negative depiction and reporting of the presence of anarcho circles has created stigma and bad attachment from many circles of society and the government not to accept the presence of anarcho circles in social life, and even tends to be repressed by the state apparatus as an extension of from the government.

Keywords: Representation, Anarcho Group, Mainstream Media.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kalangan anarko di media arus utama atas kehadiran mereka pada berbagai aksi sosial mulai dari peringatan Hari Buruh (MayDay) hingga aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melalui berbagai simbol, tanda yang mereka munculkan selama melakukan aksi sosial dan hubungan dengan wacana media dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko. Metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis) digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya memahami relasi kuasa antara wacana media dalam menggambarkan kalangan anarko dengan simbolisasi yang dilakukan oleh kalangan anarko untuk menandai kehadiran mereka pada aksi sosial. Hasil penelitian ini mendapati wacana dari media arus utama dalam menggambarkan serta memberitakan kalangan anarko di bentuk atas framing melalui berbagai proses sedemikian rupa, sehingga menghasilkan suatu konten berita yang menyematkan penilaian bahwa kalangan anarko adalah pihak paling bertanggungjawab dalam menciptakan kerusuhan, perusakan, vandalisme, hingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum selama berlangsungnya aksi sosial. Beberapa penelitian lain tentang pembahasan anarko dan media dari lintas disiplin ilmu peneliti sertakan sebagai upaya memperkuat temuan dalam penelitian ini, sekaligus mampu memberikan sudut pandang melalui dimensi lain, yakni studi terkait media dan budaya. Dikarenakan kalangan anarko memiliki tinjauan panjang pada konteks latar belakang dan sejarahnya sebagai bentuk budaya interaksi sosial di masyarakat, dan pada sisi lain, media merupakan subyek penting yang berperan menggambarkan serta memberitakan segenap bentuk fenomena dan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa penggambaran serta pemberitaan negatif terhadap kehadiran kalangan anarko telah menciptakan stigma dan penyematan buruk dari banyak kalangan masyarakat maupun pemerintah untuk tidak menerima kehadiran kalangan anarko.

Kata Kunci: Representasi, Kalangan Anarko, Media Arus Utama.

A. PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dibuat terkejut dengan pemberitaan berbagai media mengenai kalangan anarko (Anjani, 2020). Kalangan anarko menjadi pusat pemberitaan media pasca ditenggarai menjadi dalang akibat kerusuhan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung sepanjang tahun 2020 (Wahyono, 2020). Pemberitaan media terhadap kalangan anarko tertuju pada pengrusakan terhadap fasilitas umum (fasum) salah satunya adalah Halte Busway Transjakarta dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta (Suyanto, 2020). Berbagai pihak mulai dari politisi, pengamat politik, pakar media, hingga aparat negara menyebutkan kehadiran kalangan anarko sebagai kelompok yang mengenakan atribut pakaian serba hitam beserta simbol logo dengan coretan huruf A di bagian tengah (Ricardo, 2020). Hal ini lantas diangkat oleh media sebagai pemberitaan dalam menggambarkan identitas kalangan anarko. Sejak identitas kalangan anarko mencuat di publik, sorotan media senantiasa tertuju pada kehadiran kalangan ini ketika melakukan aksi memperingati Hari Buruh (*MayDay*) dan juga aksi menolak UU Cipta Kerja. Sementara itu, pihak pemerintah melalui aparat negara semakin gencar melakukan tindakan pengontrolan dan pencegahan terhadap kalangan anarko agar kasus kerusuhan tidak lagi terjadi saat massa melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Bernie, 2020).

Kalangan anarko menjadi salah satu pihak yang kerap terlibat aktif dalam berbagai aksi terutama peringatan Hari Buruh (*MayDay*) dan penolakan UU Cipta Kerja di Indonesia. Kalangan anarko memiliki sejarah panjang sebagai salah satu ideologi kiri yang dicetuskan oleh para tokoh kritis seperti; Karl Marx, Michael Bakunin, Leon Trotsky hingga Rudolf Rocker. Ideologi politik anarko ini berhubungan dengan situasi politik di beberapa negara Eropa Timur selama abad ke-20, dan kemudian berkembang luas ke banyak negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Masuknya ideologi anarko di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda (Art, 2020; Wahyono, 2020). Edward Douwes Dekker melalui bukunya berjudul *Multatuli* menggugat praktek kolonialisme merupakan tokoh awal yang kemudian membangkitkan gerakan anarkisme dengan kemunculan berbagai macam sindikat dan serikat pekerja di Indonesia sejak tahun 1914 (Wahyono, 2020). Bentuk awal dari gerakan anarkisme di Indonesia adalah pemogokan dari berbagai buruh dalam menuntut pembayaran upah mereka, juga melakukan sabotase pada jalur kereta api yang dikelola oleh pihak Belanda kala itu. Namun, ideologi ini secara perlahan meredup setelah masuknya ideologi baru berupa komunisme dan munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak tahun 1926 (Wahyono, 2020). Kebangkitan ideologi anarkisme mulai tumbuh kembali pada era-90 an menjelang runtuhnya rezim orde baru. Ideologi ini masuk melalui perkembangan *fashion* dan *subkultur* anak-anak muda penggemar musik saat itu. Mereka mengilhami ideologi anarkisme sebagai upaya dalam menggulingkan pemerintahan Soerharto (Art, 2020). Menjelang runtuhnya orde baru, berbagai gerakan kolektif dari para penganut ideologi anarkisme tidak berhasil mengaktualisasikan cita-cita serta keinginan mereka karena terlebih dahulu mendapatkan tekanan dan represi dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam kala itu sebagai kelompok dominan mengingat kuatnya Populisme Islam selama orde baru (Art, 2020). Sementara itu, rekam jejak tindak kerusuhan dari kalangan anarko di Indonesia sudah ada pasca

orde baru, tepatnya pada peringatan Hari Buruh (*MayDay*) tahun 2008 di Jakarta. Tindakan ini terus berulang pada peringatan Hari Buruh dan berbagai aksi sosial lain di tahun-tahun berikutnya (Art, 2020).

Beberapa penelitian mengenai kalangan anarko di Indonesia telah dilakukan melalui sudut pandang ragam studi berbeda. Penelitian pertama berjudul "*making the news: anarchist counter-public relations on the world wide web*". Penelitian yang dilakukan oleh Owens dan Palmer (2003) berfokus pada keadaan dilema kelompok anarkis ketika dihadapkan pada pemberitaan kelompok mereka di media. Banyak pihak tertuju pada pemberitaan di media massa mengenai kelompok anarko, namun di sisi lain, media luput dalam merepresentasikan kelompok anarko. Media dalam penelitian Owens dan Palmer (2003) selalu berfokus pada wacana negatif terhadap kelompok anarko. Sementara itu, kelompok anarko akibat wacana yang dimunculkan oleh pemberitaan media pada akhirnya melupakan substansi terkait konteks perjuangan mereka untuk dikomunikasikan kepada publik. Untuk mengurangi wacana negatif pada pemberitaan media arus utama, kelompok anarko membuat media alternatif berbasis *world wide web*. Kehadiran *world wide web* bagi kelompok anarko pada penelitian ini memiliki dua fungsi; (1)memisahkan wacana yang berasal dari dalam dan luar kelompok anarko, serta (2)menarik atensi khalayak untuk mengunjungi *website* yang dibuat secara independen oleh kelompok anarko berkaitan dengan kampanye serta isu-isu yang sedang diperjuangkan.

Penelitian kedua berjudul "*fenomenologi anarkisme,*" membahas sejarah, konsep dan perkembangan paham anarkisme di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2015), menghasilkan kesimpulan bahwa pemaknaan anarkisme tidak sebatas dipahami pada konteks dekonstruktif saja, melainkan penekanan utama paham anarkisme adalah kebebasan terhadap individu, penolakan terhadap penindasan maupun kapitalisme. Kesimpulan ini didapatkan Cahya (2015) setelah meninjau beragam aspek mengenai anarkisme, seperti; keyakinan yang diilahi oleh penganut paham anarkisme, dan beragam hal yang ditentang untuk diperjuangkan oleh kalangan anarko. Cahya (2015) juga menjelaskan dalam penelitiannya terkait perkembangan masuknya paham anarkisme di Indonesia yang ternyata sudah ada sejak masa kolonial dan kemudian merambah ke berbagai jaringan, kelompok kolektif maupun subkultur anak-anak muda Indonesia selama masa orde baru. Sehingga ia memaknai anarkisme tidak hanya sebatas suatu pemahaman secara ideologis semata.

Penelitian ketiga berjudul "*makna anarkisme di media pemberitaan online: analisis wacana pada pemberitaan pengunjuk rasa bulan Maret Tahun 2015 di harian online antaranews.com.*" Penelitian yang dilakukan Pahalmas (2016) menjelaskan konteks meunculnya kekerasan atau tindak anarkisme pada serangkaian unjuk rasa dari beragam pihak. Media massa memainkan peran memberitakan aksi unjuk rasa yang kemudian menciptakan keresahan ditengah masyarakat ketika membaca wacana anarkis. Wacana anarkisme di media massa dimaknai secara dangkal oleh masyarakat dikarenakan kurang mendalamnya pemahaman mengenai konsep anarkisme. Pada penelitian ini, Pahalmas memfokuskan pembahasan pada analisis wacana dari pemberitaan media terhadap konteks anarkisme dalam unjuk rasa. Ia memperkuat konsep anarkisme yang dikaitkan dengan hegemoni media.

Hegemoni media dalam penelitian ini merupakan konteks penting untuk dapat membangun pemaknaan bagi masyarakat sebagai pembaca melalui ideologi dominan dari media mass itu sendiri. Tercipta dominasi dari kelompok dominan terhadap kelompok terpinggirkan atas wacana teks di media massa dalam membangun suatu pemahaman melihat realitas yang terjadi.

Penelitian keempat dengan judul *“resepsi khalayak mengenai pemberitaan anarkis di media online.”* Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Gani (2021) membahas pemberitaan media online mengangkat isu tentang anarkis, anarko, dan anarkisme. Isu tersebut didalam pemberitaan media online seringkali dikaitkan dengan makna negatif. Sehingga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Indonesia ketika mendengar kata-kata tersebut. Ketakutan masyarakat berujung kepada tindakan penolakan kepada kelompok anarko secara terang-terangan tanpa mengetahui secara mendalam mengenai isu tersebut. Peranan media online sebagai institusi penyebar informasi di era perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses isu mengenai anarkisme bahkan menjadi sumber utama masyarakat. Media online didalam penelitian Pratama dan Gani (2021) ditinjau melalui kedudukannya dalam proses pembuatan wacana, mulai dari hegemoni dominan, proses negosiasi dan juga pihak oposisi. Kedudukan media online dalam membuat wacana mengenai isu anarkisme dihubungkan dengan persepsi mahasiswa FIKOM UNISBA sebagai bagian dari tatanan masyarakat menyikapi isu tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Analisis wacana kritis berusaha mengkaji suatu makna secara lebih dalam dari seseorang atau kelompok masyarakat yang telah ditulis ataupun disampaikan. Analisis wacana kritis tidak sebatas menganalisis bahasa sebagai komponen produksi makna, namun juga mengaitkan konteks dalam suatu peristiwa sebagai sumber pengalaman (Masitoh, 2020). Hal ini telah dijelaskan oleh Darma (2009) bahwa analisis wacana kritis tidak sebatas membahas suatu wacana dari unsur kebahasaan saja, namun dikaitkan dengan konteks, dimana konteks merujuk pada penggunaan bahasa pada situasi ataupun kondisi tertentu. Dasar teoretis analisis wacana dilatarbelakangi oleh studi filsafat ilmu pengetahuan serta berbagai macam teori sosial. Faktor-faktor seperti; sejarah atau historis, sosial hingga ideologi merupakan sumber utama bagi kerangka kerja metode analisis wacana kritis (Masitoh, 2020).

Pada metode analisis wacana kritis, kehadiran teks wacana tidak menjadi bagian dari makna secara nyata. Kebiasaan pribadi seorang manusia dan status sosialnya sebagai pemroduksi suatu teks wacana-lah yang menggambarkan pribadinya dalam teks wacana. Teks wacana dipengaruhi oleh konteks sosial, sesuai dengan argumentasi Fairclough (1989), dimana wacana merupakan bentuk dari praktik sosial yang memiliki implikasi terhadap dialektika dan konteks sosial. Fenomena sosial sebagai bagian dari pengalaman seorang manusia bersifat linguistik karena tidak sebatas berwujud ekspresi ataupun refleksi dari praktik sosial, namun telah menjadi bagian dalam praktik sosial itu sendiri. Analisis wacana kritis seringkali

digunakan dalam proses menganalisis kekuasaan dan relasi sosial di masyarakat (Masitoh, 2020).

Analisis wacana kritis memiliki beberapa karakteristik penting yang diuraikan oleh Van Dijk. Karakteristik pertama yakni berupa tindakan. Dalam mempraktikkan suatu wacana, seseorang mengungkapkan maksud yang ingin ia tujukan, bertujuan agar bisa mempengaruhi orang lain sebagai subyek sesuai dengan apa yang ia inginkan. Pada karakteristik ini, analisis wacana kritis memiliki dampak konsekuensi karena pewacanaan oleh seorang manusia dilakukan dengan kesadaran akan suatu hal yang sedang ia lakukan.

Karakteristik kedua adalah konteks. Unsur ataupun komponen yang terdapat di luar bahasa juga harus dianalisis. Menurut Sobur, konteks adalah segala hal yang berada di luar bahasa, seperti; partisipan, situasi dan kondisi, serta fungsi dari maksud suatu wacana. Konteks dalam pandangan Eriyanto (2001) dapat diidentifikasi kedalam dua bentuk, yakni; (1)gender, status sosial, tingkat pendidikan serta agama yang diyakini dan (2)latar sosial, diantaranya adalah tempat dan waktu. Analisis wacana kritis memasukkan konteks kedalam lingkup historis, kekuasaan serta ideologi (Fauzan, 2014). Konteks mengenai latar memiliki persamaan dengan konteks situasi, dan latar belakang pengetahuan (Masitoh, 2020). Analisis wacana kritis berupaya untuk merepresentasikan teks wacana dan konteks secara bersama.

Karakteristik ketiga adalah aspek historis, dimana aspek historis memainkan peran penting atas produksi suatu teks wacana. Sehingga analisis wacana kritis selalu memasukkan aspek historis agar pewacanaan dari seorang manusia mampu di mengerti oleh orang lain (Masitoh, 2020).

Karakteristik keempat berhubungan dengan unsur kekuasaan. Sebagaimana Eriyanto (2001) mengungkapkan bahwa suatu wacana diproduksi tidak berlangsung secara alami, melainkan hasil dari pertarungan kekuasaan yang berkaitan erat dengan kondisi masyarakat. Kekuasaan dipandang sebagai sebuah kontrol dalam wacana yang memiliki hubungan erat dengan kelompok dominan. Kelompok dominan dalam tatanan masyarakat selalu memiliki kekuasaan terhadap kelompok minoritas atau termarginalkan. Kondisi demikian terjadi karena adanya relasi sosial diantara masyarakat (Eriyanto, 2001).

Karakteristik kelima adalah ideologi. Wacana menjadi bentuk dari ideologi tertentu yang diyakini oleh seorang manusia (Masitoh, 2020). Ideologi kemudian dibentuk oleh kelompok dominan dengan tujuan melegitimasi kedudukan dari kelompok tersebut di tatanan sosial masyarakat (Eriyanto, 2001). Kelompok dominan berusaha mempengaruhi tatanan sosial masyarakat dengan memproduksi wacana dan membagikannya kepada kelompok lain untuk menegaskan kedudukan mereka. Adanya ideologi menegaskan jatidiri atau identitas suatu kelompok masyarakat, hal ini menimbulkan ketidaksamaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maka, wacana menjadi suatu konteks yang dimunculkan oleh seorang manusia dalam upaya perebutan pengaruh, kedudukan, dan kekuasaan. (Masitoh, 2020).

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) memiliki beberapa pendekatan yang dimunculkan oleh para tokoh-tokoh kritis sebagai upaya memahami wacana melalui berbagai

sudut pandang. Pendekatan pertama, yakni dialectical-relational approach diperkenalkan oleh Norman Fairclough. Fairclough (1989) menjelaskan terdapat hubungan antara terbentuknya suatu wacana dengan praktik sosial. Ia menjabarkan keduanya saling berpengaruh satu sama lain. Wacana mempengaruhi tatanan sosial, sebaliknya tatanan sosial berpengaruh kepada wacana. Fairclough (1989) juga menjelaskan bahwa wacana dapat dibentuk ataupun membentuk masyarakat, mengubah hubungan sosial serta identitas sosial. Argumentasi akhir dari Fairclough adalah hubungan antara kekuasaan dan ideologi yang membentuk terjadinya suatu wacana (Fairclough, 1989).

Pendekatan kedua oleh Theo Van Leeuwen mengenai analisis wacana kritis berfokus pada kemunculan aktor sosial dalam sebuah wacana. Kelompok dominan sebagai pemegang kekuasaan memiliki kendali lebih terhadap kelompok minoritas dan marjinal, sehingga kelompok yang lebih rendah ini diwacanakan sebagai kelompok bersifat negatif (Masitoh, 2020). Pendekatan dari Theo Van Leeuwen ini dikenal sebagai social actors approach atau pendekatan aktor sosial. Pendekatan keempat dijabarkan oleh Teun Van Dijk, berokus pada aspek kognisi sosial (socio cognitive). Terdapat tiga dimensi dalam pemaparan Van Dijk mengenai analisis wacana kritis, yakni (1)teks, (2), kognisi sosial, dan (3)konteks sosial. Dimensi teks menganalisis struktur dari suatu teks wacana beserta strategi pewacanaan untuk memperjelas maksud yang ingin disampaikan oleh seorang manusia. Dimensi kognisi sosial menganalisis proses kognisi dari masing-masing individu manusia dalam memperoleh pemaknaan untuk kemudian memproduksi suatu wacana. Sementara dimensi konteks sosial menganalisis kerangka wacana yang sedang berkembang di masyarakat. Van Dijk kemudian membagi kerangka wacana kedalam tiga struktur guna membentuk suatu kesatuan terhadap suatu wacana. Struktur makro merujuk pada keseluruhan makna pada suatu wacana, super struktur merujuk pada skema penggunaan suatu wacana, dan struktur mikro merujuk pada makna hasil dari proses kompleks terkait retorika. Kesimpulan dari pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk adalah pertimbangan makna dalam suatu wacana melalui analisis ketiga struktur tersebut untuk dapat menjelaskan kognisi sosial dari pembuat wacana (Masitoh, 2020).

Pendekatan keempat berkaitan dengan aspek sejarah oleh Ruth Wodak. Wodak berfokus kepada faktor sejarah dalam melakukan analisis suatu wacana. Konteks sejarah atau histori sangat berguna untuk menjelaskan kelompok-kelompok dalam sebuah tatanan masyarakat. Pendekatan terakhir terkait dengan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) dijelaskan oleh Sara Mills dengan menggunakan perspektif feminisme. Sara Mills melakukan analisis mengenai perempuan yang dimunculkan dalam suatu wacana termasuk penggambaran perempuan baik sebagai pelaku maupun subjek dan/atau objek dari sebuah wacana. Mills (dalam Masitoh, 2020) membagi proses analisis kedalam tiga tingkatan, yakni kata, frasa atau kalimat, serta wacana yang meliputi; karakter maupun peran dari perempuan.

Banyak pemahaman yang kerap digunakan untuk memaknai konsep mengenai representasi. Menurut Piliang (dalam Surahman, 2014), representasi merupakan tindakan yang merepresentasi suatu hal melalui tanda ataupun simbol tertentu. Representasi merujuk pada proses penyampaian realitas berupa komunikasi berbentuk kata, suara, maupun citra atau

tampilan (Surahman, 2014). Stuart Hall (2003) secara lebih jauh mengungkapkan bahwa representasi menunjukkan suatu proses pemaknaan melalui penggunaan bahasa yang saling ditukar oleh beragam kelompok didalam tatanan kebudayaan masyarakat. Representasi berhubungan antara konsep didalam pemikiran seorang manusia, memungkinkan manusia mampu memaknai benda, orang, kejadian nyata hingga suatu imajinasi. Melalui representasi, makna diproduksi dan kemudian dipertukarkan diantara anggota masyarakat (Surahman, 2014).

Representasi terdiri atas komponen yang saling berkorelasi, yakni konsep dan bahasa. Konsep merupakan segala hal yang terdapat didalam pemikiran manusia, membuat manusia mampu memahami makna atas suatu hal tertentu. Sementara bahasa menjadi komponen dalam mengkomunikasikan makna yang dipahami seseorang kepada orang lain. Hal utama mengenai representasi adalah kehadiran kelompok masyarakat yang mampu memproduksi serta bertukar makna dengan baik untuk menciptakan pemahaman selaras. Pemaknaan akan suatu hal dapat berbeda bergantung kepada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang berdasarkan cara suatu kelompok masyarakat memahami suatu hal (Surahman, 2014).

Representasi tidak berhenti ketika suatu hal telah direpresentasikan, melainkan representasi memiliki sifat konstitutif atas sebuah peristiwa tertentu, sehingga menjadi bagian dari obyek itu sendiri. Representasi sebagai bentuk hubungan antara konsep dan bahasa memungkinkan seorang manusia melihat realitas atau bahkan berorientasi imajiner. Seorang manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat mempergunakan bahasa dalam memproduksi suatu makna. Bahasa pada konteks ini memiliki jangkauan lebih luas, berupa sistem berisikan tanda-tanda (*signs*) bersifat verbal ataupun non-verbal. Representasi mengandung unsur makna yang melekat dan bersifat tetap didalamnya (Surahman, 2014).

Berkaitan dengan teori representasi seperti yang telah dijelaskan melalui pemahaman beberapa tokoh, perkembangan teori ini secara lebih jauh menyangkut pula pada permasalahan representasi politik. Konsep representasi politik secara historis banyak menyangkutkan kajian pada konteks pemilihan umum dan kaitannya dengan para wakil dengan yang terwakili (*representative and represented*). Sedangkan saat ini, permasalahan mengenai representasi politik lebih banyak berasal dari pihak yang terwakili (*represented*). Hal ini kemudian dibahas secara mendalam oleh Michael Saward (dalam Suseno, 2013) terkait kehadiran representasi berdasarkan klaim. Menurut Saward (dalam Suseno, 2013), rakyat tidak lagi berfungsi sebagai pemilih dalam pemilihan umum, melainkan pula sebagai pihak utama yang harus mendapatkan perhatian secara khusus karena berperan aktif menciptakan representasi. Peran aktif rakyat dapat ditemui melalui kemunculan berbagai gerakan sosial sebagai bentuk peningkatan peran masyarakat dalam mengangkat isu-isu sosial yang sedang berkembang. Mereka melakukan klaim dengan mewakili kelompok tertentu serta berdasarkan kepentingan umum. Saward menyebut bentuk representasi ini sebagai representasi informal atau non-elektoral. Organisasi Amnesty Internasional, dan Greenpeace menjadi contoh kelompok dalam representasi informal yang mengangkat berbagai isu-isu tertentu (Ekawati, 2014).

Manusia dalam keterkaitan antara representasi dengan media kini senantiasa dihadapkan dalam memaknai suatu bentuk atas sistem dan praktik yang digunakan oleh media. Sehingga, masyarakat membangun pemaknaan atas segala bentuk konten yang dilihat pada suatu media. pemaknaan yang terbangun di benak masyarakat adalah proses memaknai kembali makna yang telah dikonstruksi oleh suatu media. Dalam merepresentasikan suatu hal, media menjadikan hal ini sebagai bentuk dari hubungan sosial dan kaitannya antara dominasi maupun eksploitasi yang terjadi pada tatanan sosial masyarakat (Surahman, 2014). Representasi pada media berangkat pada hubungan antara media dan proses integrasi sosial. Komunikasi massa memiliki keleluasaan untuk menyatukan setiap individu kedalam tatanan masyarakat melalui penyediaan unsur-unsur, seperti; nilai, ide dan informasi dalam upaya pembentukan identitas (Surahman, 2014). Sebagai komponen representasi, bahasa menjadi perantara seorang manusia guna memaknai suatu hal, termasuk pada perubahan suatu makna. Jika ditarik kepada konteks media, representasi sangat bergantung pada bagaimana media merepresentasikan suatu hal. Representasi realitas oleh media didapat berdasarkan suatu pengalaman. Pengalaman ini membentuk penilaian yang kemudian kerap digunakan oleh media dalam merepresentasikan suatu hal. Setidaknya terdapat tiga pengalaman untuk membentuk penilaian bagi media. Pertama, dengan membaca ungkapan serta perilaku non-verbal seorang manusia didalam media sebagai kehidupan nyata ataupun pengalaman sosial seorang manusia. Kedua, penilaian yang dibuat berdasarkan pengalaman di media melalui pembacaan terhadap karakter seorang manusia. Ketiga, terdapat proses encoding dari media melalui produsen berdasarkan pengalaman secara tidak langsung (Surahman, 2014). Berkaitan dengan proses mediasi pesan dalam upaya merepresentasikan suatu hal tertentu oleh media, pemaknaan yang dibuat tidak dapat dilepaskan dari ideologi media (Sobur, 2006). Ideologi media diwujudkan melalui teks wacana untuk dapat memanipulasi para pembaca, sekaligus menjadi dasar media membentuk pemaknaan melalui teks wacana yang ditampilkan (Sobur, 2006).

Konsep mengenai anarkisme sering diidentifikasi lekat dengan perilaku kekerasan. Anarkisme diartikan sebagai sebuah ajaran yang menentang beragam bentuk dari kekuasaan negara (Pahalmas, 2016). Kekuasaan negara melalui kontrol secara hierarki di pandang merugikan bagi setiap individu, sehingga perlu untuk dilakukan sebuah perlawanan secara kolektif (Cahaya, 2015). Negara melalui pemerintahan sebagai institusi yang memiliki fungsi dalam menjamin kehidupan setiap warga negara dalam anarkisme di alih fungsikan pada perkumpulan yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat tanpa harus berbentuk struktural seperti keberadaan aparat negara, maupun sistem hukum dan peradilan yang mengatur kehidupan setiap warga (Samidjo, 1986). Pola anarkisme menekankan kehidupan secara kolektif dengan orientasi terhadap kepemilikan bermacam alat produksi yang dikuasai serta di kelola oleh warga secara bersama. Anarkisme meyakini bahwa kebebasan hanya dapat terwujud ketika individu mampu melakukannya dengan kemandirian tanpa adanya bantuan institusi dan otoritas yang mengatur seperti negara. Anarkisme dan komunisme hampir selalu disamakan oleh banyak kalangan, namun sebenarnya kedua paham ini memiliki perbedaan yang sangat kentara. Jika komunisme menekankan kehadiran partai politik dengan segenap

sistem struktural yang mengatur, maka anarkisme menolak gagasan ini (Anjani, 2020). Bakunin (1972) sebagai salah satu tokoh anarkisme menekankan kolektivisme dan revolusi sosial secara langsung melalui beragam bentuk dari para serikat-serikat pekerja. Tujuan anarkisme adalah terciptanya kebebasan individu dan persamaan hak di tengah tatanan masyarakat. Tujuan yang dimaksud menekankan ketiadaan seorang pemimpin (*without leader*) yang di nilai memiliki kekuasaan atau otoritas dalam melakukan kontrol serta beragam bentuk penindasan terhadap individu (Cahya, 2015).

Media telah mendistorsi makna anarkisme hingga saat ini. Konteks perilaku massa aksi dalam sebuah demonstrasi yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum kerap disebut sebagai suatu aksi anarkis (Cahya, 2015). Kehadiran media turut serta menciptakan opini masyarakat dalam memaknai anarkisme dengan memberikan stimulus melalui muatan konten, maupun pesan dalam pemberitaan mengenai anarkisme. Dalam sudut pandang media, kelompok anarko sebagai pihak yang mengilhami ideologi anarkisme senantiasa berada pada pihak yang disalahkan. Kelompok anarko kerap direpresentasikan sebagai pihak penghasut, perusuh, maupun perusak. Representasi ini didasarkan atas konstruksi media lebih dari sekedar konteks bahasa untuk membangun pemaknaan khalayak terhadap anarkisme (Yaumul, 2021).

Media berada di tengah realitas sosial dengan kompleksitas kepentingan maupun konflik yang terjadi di masyarakat. Louise Althusser memandang media lekat dengan kekuasaan, terutama sebagai sarana legitimasi telah menjadi alata kekuasaan negara untuk menciptakan rasa patuh terhadap kelompok penguasa melalui doktrinasi ideologi (Sobur, 2006). Sementara Antonio Gramsci memandang media telah mengabaikan resistensi ideologi kelas-kelas ter subordinasi dalam masyarakat. Media menjadi 'arena' pertarungan berbagai ideologi. Lebih jauh, Gramsci melihat kehadiran media sebagai ruang suatu ideologi di representasikan. Pada satu sisi, media merupakan alat bagi kelompok penguasa untuk semakin meligitimasi kekuasaan mereka melalui kontrol terhadap wacana publik. Di sisi lain, media juga dapat menjadi ruang resistensi terhadap ideologi kelompok penguasa, membangun suatu kultur ideologi suatu kelas, serta perjuangan kelompok ter subordinasi membangun wacana tandingan (Sobur, 2006).

Media juga disebut sebagai kekuasaan keempat (*the fourth estate*) pada kehidupan masyarakat. Konteks ini berkaitan dengan peranan media untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dari beragam aspek, mulai sosial, politik, dan ekonomi. Media merupakan suatu institusi pembentuk opini publik, melalui penekanan terhadap gagasan, dan juga sebagai alat kepentingan guna merepresentasikan suatu hal dalam kehidupan masyarakat (Sobur, 2006). Berkaitan dengan gerakan sosial, Kielbowicz dan Scherer (1986) mengungkapkan bahwa media di era modern telah berkembang sebagai pusat sirkulasi suatu gerakan sosial. Namun, bagi pihak pemrotes, mereka selalu berposisi sebagai pihak yang kurang berkuasa ketika dihadapkan dengan pemberitaan media karena sistem kontrol yang diterapkan oleh suatu media (McChesney, 1999).

Peranan media tidak terbatas pada memberitakan suatu peristiwa tertentu, melainkan pula membuat suatu berita menjadi hal yang sangat menarik. Sistem dari media terkait hal yang

layak untuk diberitakan berbanding terbalik ketika dihubungkan dengan para pemrotes terkait gerakan sosial yang sedang dilakukan (Gans, 1979). Terdapat konteks ‘bias media’ untuk mengetahui hubungan suatu gerakan sosial dan pemberitaan media. Bias media sangat menentukan seleksi terhadap hal-hal yang akan diberitakan oleh suatu media. Menurut McCarthy et al. (1996), terdapat beberapa faktor yang berpengaruh antara pemberitaan media dan gerakan sosial. Faktor pertama berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diberitakan. Dalam hal ini media berfokus pada siklus suatu gerakan sosial dan pengaruhnya bagi produksi berita. Penilaian terkait gerakan sosial yang baik ataupun buruk untuk kehidupan masyarakat dihubungkan dengan muatan yang diangkat oleh suatu media. Faktor kedua adalah seberapa besar suatu gerakan sosial berlangsung. Bagi media, semakin besar gelombang protes yang dilakukan melalui gerakan sosial, maka media akan berpeluang untuk memberitakan gerakan sosial tersebut tiada henti. Faktor ketiga berkaitan dengan segala bentuk hambatan yang terjadi pada suatu gerakan sosial, seperti pihak yang kontra dengan suatu gerakan sosial, bentuk tindak kekerasan terhadap para pemrotes, maupun represi dari pihak aparat kepada para pemrotes (McCarthy et al., 1996).

Selain faktor yang telah diungkapkan oleh McCarthy et al., bias deskripsi terhadap suatu pemberitaan media juga menjadi pilihan media untuk menggambarkan gerakan sosial yang sedang diliput (Smith et al., 2001). Penggambaran gerakan sosial dalam pemberitaan media dapat ditinjau melalui penyebaran isu yang dilakukan oleh pemrotes melalui media, ataupun sebaliknya hanya menjelaskan runtutan peristiwa aksi gerakan sosial dan mengesampingkan peran dari para pemrotes dalam gerakan sosial tersebut (Iyenger, 1991). Bias deskripsi negative muncul terutama berkaitan dengan tindakan kekerasan, hingga penangkapan pihak aparat kepada para pemrotes. Pada konteks ini, kelompok marjinal berskala kecil selalu dirugikan dengan pemberitaan yang dibuat oleh media. Media memberitakan gerakan sosial dari kelompok marjinal sebatas untuk pemenuhan liputan tanpa mengidentifikasi secara lebih jauh kaitan antara kelompok marjinal, protes yang dilakukan serta muatan dari isu yang di protes (Smith et al., 2001). Maka jalan akhir bagi para pemrotes adalah dengan menciptakan gangguan selama berlangsungnya aksi gerakan sosial dan dampak dari gangguan yang dilakukan menciptakan pemberitaan negatif dari media. Smith et al. (2001), mengasumsikan hal ini atas pemberitaan media yang tetap memuat deskripsi negatif atas gerakan sosial radikal walaupun mereka tidak sama sekali menciptakan bentuk gangguan. Penggambaran media terhadap gerakan sosial radikal selalu menghasilkan deskripsi yang sama, yakni kurang dirasa lengkap jika tidak diikuti dengan gangguan yang diciptakan kelompok-kelompok marjinal (Smith et al., 2001).

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis representasi kalangan anarko di media, metode analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dari Norman Fairclough dipilih oleh peneliti untuk mengkaji keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Fairclough (1989), bahwa terdapat hubungan antara terbentuknya suatu wacana dengan praktik sosial.

Sebelum mengkaji secara lebih jauh pembahasan ini, dapat dianalisis bahwa wacana terhadap isu kalangan anarko berangkat dari praktik sosial berupa aksi-aksi yang telah dilakukan oleh kalangan anarko pada gerakan sosial. terdapat kesinambungan antara wacana dan praktik sosial. Suatu wacana dari media mampu berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat, begitupun sebaliknya. Pada konteks ini, wacana negatif media terhadap kalangan anarko tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sebagai pihak yang membaca setiap wacana dari media atas isu kalangan anarko. Pengaruh ini tampak melalui terbangunnya stigma negatif masyarakat terhadap kalangan anarko, perasaan takut dan waswas atas kehadiran kalangan anarko, juga dengan kata-kata anarkisme yang melekat dengan kalangan anarko sebagai ideologi radikal di Indonesia. Masyarakat umum sebagai pihak dominan dalam tatanan sosial masyarakat kemudian menentang segala bentuk tindak anarkisme dan kehadiran dari kalangan anarko di Indonesia. Kondisi ini kemudian dikonstruksi oleh media dengan membuat wacana negatif terhadap kalangan anarko sebagai rangkaian proses penggambaran identitas kalangan anarko.

Peneliti secara lebih lanjut melakukan analisis berdasarkan tinjauan konsep representasi. Peneliti mengkaitkan konteks ini antara kalangan anarko dengan penjelasan representasi dari Michael Saward. Argumentasi Saward terkait kedudukan rakyat yang kini tidak lagi terbatas pada pihak pemberi hak pilih pada pemilu, melainkan pihak utama dan memiliki peran aktif dalam menciptakan representasi memiliki relevansi ketika mengkaitkannya dengan kalangan anarko. Sebagai kelompok dalam tatanan sosial masyarakat, kalangan anarko cenderung untuk tidak sama sekali menggunakan hak pilih dalam pemilu sebagai bagian dari hak politik. Hak politik dari kalangan anarko di representasikan melalui kehadiran identitas kelompok mereka sebagai kelompok sosial masyarakat. Tercipta klaim sebagaimana penjelasan dari Saward, dimana kelompok anarko memiliki klaim atas penolakan pada tindak diskriminasi, penindasan, maupun eksploitasi dari setiap kebijakan pemerintah. Penolakan ini diwujudkan melalui aksi-aksi pada gerakan sosial. Beberapa contoh yang ada di Indonesia diantaranya adalah, penolakan terhadap UU Cipta Kerja, serta aksi turun ke jalan saat peringatan Hari Buruh (*MayDay*). Klaim dari kalangan anarko, didasarkan atas kepentingan dalam upaya memperjuangkan serta menuntut hak-hak sosial masyarakat.

Kaitan antara representasi dan media condong untuk mengarah pada praktik pihak media sebagai upaya melegitimasi sistem yang media terapkan. Dalam merepresentasikan suatu hal melalui wacana, media didasarkan pada dominasi dan eksploitasi yang ada di dalam tatanan sosial masyarakat. Representasi oleh media ini diperkuat pula dengan proses pengintegrasian kedua unsur tersebut. Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan analisis bahwa dominasi merujuk pada kedudukan antara media, masyarakat dominan, serta kelompok marjinal. Media membuat suatu representasi melalui wacana berdasarkan pada perspektif dan sudut pandang yang dianut oleh masyarakat umum. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, masyarakat di Indonesia cenderung memiliki perspektif yang berlawanan dengan perspektif kalangan anarko terutama pada urusan sosial, politik, maupun ekonomi. Atas hal ini, media mengintegrasikan dominasi masyarakat untuk memperkuat legitimasi mereka berdasarkan paham masyarakat umum dalam memandang kalangan anarko guna membentuk wacana.

Selain dominasi, eksploitasi media secara tidak langsung telah diwujudkan melalui doktrin berbagai wacana agar masyarakat mempercayai wacana tersebut guna membangun pemahaman terhadap isu kalangan anarko. Lebih jauh, ketika meninjau representasi pada penjelasan Saward, peneliti memposisikan kalangan anarko sebagai kelompok representasi informal dikarenakan ketiadaan struktur yang mengatur di dalam internal kelompok anarko pada setiap aksi dan gerakan perjuangan yang mereka lakukan. Kalangan anarko juga berada diluar lingkaran konteks kekuasaan, menjadikan kelompok mereka tidak memiliki relasi kuasa dengan pihak pemerintah maupun masyarakat umum.

Analisis berikutnya berfokus pada bias media dalam wacana mengenai isu anarkisme. Pendistorsian wacana anarkisme oleh media ditengah realitas sosial yang terjadi oleh peneliti dikaitkan dengan penjelasan Louis Althusser (Sobur, 2006). Media saat ini dipandang oleh Althusser sebagai alat kuasa negara untuk melegitimasi ideologi pihak penguasa dalam menciptakan kepatuhan bagi masyarakat. Sebagai sarana kekuasaan, penting bagi institusi media untuk senantiasa merepresentasikan suatu hal melalui sudut pandang ideologi dari media. Hal ini berkebalikan dengan para pengunjuk rasa sebagai kelompok dalam tatanan sosial masyarakat menjadi pihak yang non-berkuasa akibat wacana pihak media. Melalui tinjauan ini, peneliti menganalisis bahwa media dalam mewacanakan kalangan anarko mengutungkan pihak pemerintah karena wacana media memuat pendeskripsian negatif terhadap kalangan anarko. Sementara itu, adanya wacana negatif media semakin menyudutkan kalangan anarko untuk melakukan setiap aksi dan gerakan perjuangan. Pada akhirnya, ketiadaan kekuasaan, terciptanya stigma negatif, serta pihak yang selalu disalahkan membuat kalangan anarko hanya bisa melakukan aksi tindak kekerasan untuk berupaya mengganggu terciptanya proses kebijakan dari pemerintah. Kalangan anarko pada akhirnya harus menerima segenap pemaknaan dari berbagai pihak atas gangguan yang dilakukan secara dangkal dan sesuai dengan wacana di media.

Pemberitaan terhadap kalangan anarko oleh berbagai media di Indonesia dipenuhi dengan kepentingan dari pihak media terutama proses menciptakan wacana terhadap kalangan anarko dan kaitannya pada beragam aksi gerakan sosial, salah satunya penolakan UU Cipta Kerja. Media mendeskripsikan kalangan anarko melalui wacana yang negatif. Wacana ini dibentuk dengan deskripsi negatif kalangan anarko pada pemberitaan media, seperti; mengganggu ketertiban proses aksi, melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya aksi, maupun pengerusakan fasilitas umum. Wacana media terhadap kalangan anarko menggambarkan mereka sebagai kelompok penganut paham radikal yang mengancam kenyamanan hidup masyarakat, mengancam pihak pemerintah, mengganggu stabilitas politik negara, serta pihak paling bersalah atau bertanggungjawab atas segala bentuk tindakan anarkisme. Isu kalangan anarko oleh media diwacanakan sedemikian rupa hingga kemudian menimbulkan stigma buruk di masyarakat, pemerintah, serta pihak aparat negara. Secara lebih jauh, posisi kalangan anarko selalu 'di buru' pihak aparat guna mengikis paham atau ideologi yang dianggap radikal tersebut. Fokus dan perhatian media terhadap kalangan anarko di Indonesia sejauh ini masih terletak pada konteks mendeskripsikan siapa kelompok mereka, apa paham yang mereka anut, bagaimana mereka merepresentasikan kelompoknya pada suatu aksi, bagaimana paham atau

ideologi yang dan mereka anut bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Pendeskripsian wacana ini muncul di banyak media sejak kalangan anarko muncul pada berbagai aksi gerakan sosial.

Pada sisi lain, media menjadi bias dalam mendeskripsikan kalangan anarko pada konteks wacana. Wacana yang dimunculkan terhadap kalangan anarko melalui deskripsi negatif bersumber pada pihak dominan, seperti pemerintah dan aparat negara. Dimana pihak-pihak tersebut memiliki kontrol dan kuasa atas sistem dan tatanan sosial masyarakat. Sementara itu, media tidak sama sekali mendeskripsikan wacana kalangan anarko dari pihak anarko. Sehingga wacana media terhadap kalangan anarko menjadi kurang obyektif serta cenderung bias. Bias pemberitaan media terhadap kalangan anarko membentuk stigma negatif di masyarakat atas pendeskripsian wacana anarko oleh media. Terbentuknya stigma negatif masyarakat terhadap kalangan anarko semakin menegaskan kalangan anarko berposisi sebagai kelompok ter subordinasi dalam tatanan masyarakat. Sebagai kelompok ter subordinasi, kalangan anarko tidak bisa menghilangkan penggambaran yang telah melekat kepada mereka sekaligus stigma negatif dari banyak pihak. Kalangan anarko juga kesulitan melakukan beragam aksi pada suatu gerakan sosial karena keterbatasan ruang untuk melakukan gerakan perjuangan. Melalui pendeskripsian wacana negatif dari media, pihak pemerintah beserta aparat negara senantiasa berusaha merepresi kehadiran kalangan anarko melalui berbagai cara, seperti; membuat wacana bahwa kalangan anarko adalah kelompok berpaham radikal, mengganggu bahkan merusak fasilitas umum, maupun penangkapan terhadap setiap anggota anarko pada aksi-aksi gerakan sosial. Represi pihak pemerintah dan aparat negara tidak hanya berhenti pada tataran tersebut, melainkan meluas secara lebih jauh ke berbagai konteks lain seperti pengontrolan terhadap simbol dan tanda berkaitan dengan kehadiran kalangan anarko. Simbol dan tanda berkaitan dengan kalangan anarko merupakan hasil pendeskripsian wacana negatif media. Pada beberapa kasus pemberitaan di media, kalangan anarko diidentifikasi melalui cara berpakaian, penggunaan logo tertentu, serta keberadaan bahan bacaan atau literasi mengenai paham anarkisme. Media secara gamblang mengidentifikasi kalangan anarko selalu mengenakan pakaian serba hitam, mengunggah logo A bulat, dan merujuk pada beragam buku ataupun literasi yang dianggap radikal dan dilarang beredar oleh pihak pemerintah. Alhasil, beberapa media juga membuat wacana pemberitaan terkait penyitaan terhadap buku bacaan di beberapa toko buku karena memuat paham radikal yang dilarang di Indonesia.

Temuan lain terkait dengan representasi kalangan anarko pada media berhubungan pada konteks relasi-kuasa dan ekonomi-politik. Pada konteks relasi-kuasa, media memiliki kedudukan strategis atas peran mereka dalam memberi segenap informasi melalui wacana tentang anarkisme beserta kalangan anarko. Media berhasil membangun relasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat negara, serta masyarakat sebagai pihak-pihak yang merasa resah dengan hadirnya kalangan anarko dan pemahaman anarkismenya. Melalui pendeskripsian wacana kalangan anarko serta paham anarkisme, media telah memberi stimulus kepada banyak pihak untuk peduli mengenai isu anarkisme dan kehadiran kalangan anarko. Media memiliki kuasa lebih dalam membuat wacana terkait kalangan anarko berdasarkan kedudukan strategis mereka, dimana dalam hal ini media secara tidak langsung telah menjadi agen dari pihak

pemerintah beserta aparat negara untuk memuluskan upaya pencegahan beredarnya paham dan kelompok radikal di Indonesia. Media menggunakan paham atau ideologi dominan sebagai sudut pandang dalam mewacanakan kehadiran kalangan anarko, sehingga pendeskripsian wacana tersebut selalu menghasilkan pemberitaan buruk terhadap kalangan anarko pada setiap aksi gerakan sosial yang mereka lakukan. Pewacanaan media terhadap kalangan anarko memiliki legitimasi kuat untuk membangun pemaknaan, pemahaman serta sudut pandang beragam pihak, terutama kalangan masyarakat untuk menilai kalangan anarko sebagai kelompok yang radikal, dan meresahkan.

Sementara untuk konteks ekonomi-politik, wacana mengenai kalangan anarko oleh media menarik perhatian berbagai media untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Intensitas wacana kalangan anarko oleh media seperti; penggambaran kelompok mereka, beragam hal yang dilakukan saat melakukan aksi, pengidentifikasian kalangan anarko pada suatu aksi mampu mendatangkan pembaca pada setiap pemberitaan dari suatu media. Jumlah pembaca yang mengunjungi laman media untuk mengetahui dan mengikuti isu kalangan anarko tentunya dimanfaatkan oleh setiap media dengan mengakumulasi jumlah tersebut guna dikirimkan kepada para pengiklan agar tertarik memasarkan atau mempromosikan produk barang atau jasa mereka pada tampilan laman berita media. Terdapat sistem dan perjanjian antara kedua pihak (media dan pengiklan) agar keduanya saling diuntungkan. Pihak media menarik tarif kepada setiap pengiklan yang ingin mengiklankan produk barang atau jasanya dalam laman berita untuk mendapat pemasukan ekonomi, sementara pihak pengiklan yang telah membayar tarif pemasangan iklan di laman berita akan mendapat keuntungan atas ditampilkannya produk mereka oleh media pada dalam laman berita. Selain akumulasi ekonomi, kepentingan politik media atas wacana kalangan anarko tidak lain adalah institusi paling aktual yang mampu menginformasikan isu anarkisme kalangan anarko kepada masyarakat. Melalui setiap pemberitaan yang dipublikasi berkala dan intens, membuat masyarakat tentu akan merasa penasaran dengan isu yang sedang berkembang. Disinilah kepentingan media masuk, dimana masyarakat hanya bisa mengakses informasi terbaru mengenai isu kalangan anarko pada setiap pemberitaan yang dibuat, terlepas dari pendeskripsian wacana negatif terhadap kalangan anarko. Semakin panasnya suatu isu yang sedang berkembang dan ramai diperbincangkan oleh banyak pihak akan membuat media memainkan kepentingan politiknya dalam meraih atensi publik melalui pemberitaan terhadap isu-isu tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini kehadiran kalangan anarko oleh media diwacanakan secara negatif. Wacana negatif dari media telah membentuk dan mempengaruhi perspektif masyarakat dalam memandang kalangan anarko. Representasi kalangan anarko didapati oleh beragam pihak berdasarkan hasil konstruksi realitas yang diciptakan oleh media. Penggambaran ini sesuai dengan konteks paham ideologi dominan baik dari media itu sendiri maupun pihak-pihak lain seperti masyarakat maupun pemerintah. Menempatkan kalangan anarko sebagai kelompok sosial yang tidak memiliki kuasa lebih atas

segala bentuk wacana yang melekat kepada mereka. Maka dari itu, kalangan anarko pada akhirnya memilih untuk menggunakan cara-cara konvensional seperti menciptakan gangguan sebagai bentuk representasi kelompok mereka guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari pihak pemerintah. Gangguan yang diciptakan oleh kalangan anarko sayangnya dikonstruksi oleh media, dengan mengubah pemaknaan sesungguhnya untuk menciptakan pemaknaan baru kepada masyarakat mengikuti sistem dan praktik hingga ideologi dari media tersebut. Pemaknaan ini yang kemudian menyebar di masyarakat, dan digunakan dalam memandang kehadiran kalangan anarko beserta ideologi anarkisme yang mereka anut.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, K. (2020). *Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatisasi dan Pelanggaran Hak Kelompok Anarko-Sindikalis*. Lokataru Foundation.

Art, M. (2020, April 15). *Menggali Akar Anarkisme di Indonesia*. Historia.id. <https://historia.id/politik/articles/menggali-akar-anarkisme-di-indonesia-vgXG7>

Bakunin, M. A. (1972). *Bakunin on Anarchy*. Vintage Books.

Bernie, M. (2020, April 17). *Sepekan Penangkapan 'Anarko', Hantu yang Dibuat untuk Meneror Warga*. Tirto.id. <https://tirto.id/sepekan-penangkapan-anarko-hantu-yang-dibuat-untuk-meneror-warga-eNVk>

Cahya, M.F.N. (2015). Fenomenologi Anarkisme. *Jurnal Unair*. 4(1). pp. 1-10. <http://journal.unair.ac.id/Kmnts@fenomenologi-anarkisme-article-9567-media-135-category-8.html>

Darma, Y.A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya.

Ekawati, E. (2014). Dari Representasi Formal ke Representasi Non-Elektoral. *Jurnal Penelitian Politik*. 11(2). pp. 129-136. <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.205>

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.

Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Addison Wesley Longman.

Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidik*, 19(1). pp.27-40. <http://dx.doi.org/10.1177/1742766510373715>

Gans, H. (1979). *Deciding what's news: A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time*. Vintage.

Hall, S. (2003). *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. Sage Publication.

Iyengar, S. (1991). *Is anyone responsible?: How television frames political issues*. University of Chicago Press.

Kielbowicz, R. B., & Scherer, C. (1986). The role of the press in the dynamics of social movements. *Research in Social Movements, Conflict and Change*, 9, pp. 71–96.

Masitoh. (2020). Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Elsa*, 18(1). <http://dx.doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221>

McCarthy, J. D., McPhail, C., & Smith, J. (1996). Images of protest: Selection bias in media coverage of Washington, D.C. demonstrations. *American Sociological Review*, 61(3), pp. 478–499. <http://dx.doi.org/10.2307/2096360>

McChesney, R. (1999). *Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times*. University of Illinois Press.

Owens, L., & Palmer, K. (2003). Making the News: Anarchist Counter-Public Relations on the World Wide Web, *Critical Studies in Media Communication*, 20(4), pp. 335-361. <http://dx.doi.org/10.1080/0739318032000142007>

Pahalmas, J. Z. (2016). Makna Anarkisme di Media Pemberitaan Online (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Pengunjuk Rasa Bulan Maret Tahun 2015 di Harian Online antaranews.com). *Jurnal Inovasi*, 10(2). pp. 103-116.

Pratama, R. A. P., & Gani, R. (2021). Resepsi Khalayak Mengenai Pemberitaan Anarkis di Media Online. *Prosiding Jurnalistik*, 7(1). pp. 10-13. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25169>

Ricardo. (2020, Oktober 27). *Irjen Nana Ungkap Ciri Khas Kelompok Anarko, Punya Simbol dan Seragam*. Jpnn.com. <https://m.jpnn.com/news/irjen-nana-ungkap-ciri-khas-kelompok-anarko-punya-simbol-dan-seragam?page=2>

Samidjo. (1986). *Ilmu Negara*. Armico

Smith, J., McCarthy, J. D., McPhail, C., & Augustyn, B. (2001). From protest to agenda building: Description bias in media coverage of protest events in Washington, D.C. *Social Forces*, 79(4), pp. 1397–1423. <http://dx.doi.org/10.1353/sof.2001.0053>

Sobur, A. (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT. Remaja Rosdakarya.

Surahman, S. (2014). Representasi Perempuan Metropolitan Dalam Film Hati, Cinta, Wanita. *Jurnal Komunikasi*, 3(1). pp.

Suseno, Nuri. (2013). *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Puskapol FISIP UI.

Suyanto. (2020, Oktober 8). *Ini Kelompok yang Diduga Bikin Rusuh. Namanya Anarko. Polisi : 1.000 Orang Diamankan*. Surya.co.id. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/10/08/ini-kelompok-yang-diduga-bikin-rusuh-namanya-anarko-polisi-1000-orang-diamankan>.

Wahyono, E. (2020, Oktober 13). *Anarko Sindikalis dan Jejak Anarkisme di Indonesia*. Detik.com. <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20201013/Anarko-Sindikalis-dan-Jejak-Anarkisme-di-Indonesia/>

Yaumil, M. (2021). *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan “Anarko Rancang Penjarahan Se-Pulau Jawa” Di Portal Media (Media Indonesia.Com, Sindonews.Com, Dan Cnn Indonesia.Com)*. Thesis. Universitas Mercu Buana.